

KESULTANAN TERNATE PADA ERA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1945-1968)

Rustam Hasim

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun

Pos-el: rustamhasyim@gmail.com

Abstract

The proclamation of the independence of Indonesia in 1945, politically for the Ternate Sultanate was the beginning of the collapse of feudalism institutions with the birth of a new state (Republic of Indonesia). Certainly a threat to their political and economic supermation. The role and position of the autonomous elite in the Ternate Sultanate, which has for centuries been enjoyed, has been challenged by the development of a unitary state ideology that puts forward the basis of loyalty to the state by separating between public positions in a modern political format with traditional power. Thus a sultan does not automatically become a governor or regent, competing to be chosen through contestation through political parties or positions in the bureaucracy is no longer a competing geneological inheritance must be based on certain competencies. In dealing with these changes, the solution adopted by the Ternate Sultanate was to stand or join in the logic of Sukarno's power by involving himself in various national political circles, or taking a different stance by following the concept of the state initiated by van Mook at the beginning of Indonesian independence. Differences in perception regarding the form and system of post-independence Indonesian government that would replace the forms and systems of the Dutch East Indies colonial government represented the two different camps. The nationalist view believed that the integrity of the Indonesian state depended on the strength of central control, whereas the views of Iskandar Djabir Syah (Sultan of Ternate), in fact, assumed that Indonesia would emerge as an egalitarian democratic country, providing considerable autonomy to existing provinces (in particular Eastern Indonesia).

Keywords: Political History, Ternate Sultanate and Soekarno Government

Abstrak

Proklamasi kemerdekaan RI 1945, secara politik bagi Kesultanan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara baru (negara kesatuan RI) tentu menjadi ancaman supermasi politik dan ekonomi mereka. Peran dan kedudukan kaum elite yang otonom di Kesultanan Ternate yang telah berabad-abad dinikmati, mendapat tantangan dengan dibangunnya ideologi negara kesatuan yang mengedepankan basis loyalitas pada negara dengan dilakukannya pemisahan antara jabatan-jabatan publik dalam format politik modern dengan kekuasaan tradisional. Dengan demikian seorang sultan tidak secara otomatis menjadi gubernur maupun bupati, melainkan dipilih melalui kontestasi melalui partai politik atau jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melainkan harus didasarkan atas kompetensi tertentu. Dalam menghadapi perubahan tersebut, solusi yang ditempuh oleh Kesultanan Ternate adalah berdiri atau bergabung dalam logika kekuasaan Soekarno dengan melibatkan diri dalam berbagai percaturan politik nasional, ataukah mengambil sikap berbeda dengan mengikuti konsep negara yang digagas oleh van Mook pada awal kemerdekaan RI. Perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan yang akan menggantikan bentuk dan sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda merepresentasikan kedua kubu yang berbeda. Pandangan kaum nasionalis meyakini bahwa keutuhan Negara Indonesia tergantung pada kuatnya kontrol pusat,

sedangkan pandangan Iskandar Djabir Syah (Sultan Ternate), justru beranggapan bahwa Indonesia akan tampil sebagai negara demokratis yang egaliter, dengan memberikan otonomi yang cukup luas kepada provinsi-provinsi yang ada (khususnya kawasan Timur Indonesia).

Kata Kunci : Sejarah Politik, Kesultanan Ternate dan Pemerintahan Soekarno

A. PENGANTAR

Secara politik dengan adanya proklamasi kemerdekaan RI 1945, bagi kesultanan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara baru (*state nasionalisme*) yakni negara kesatuan RI. Tentu menjadi ancaman supermasi politik dan ekonomi mereka. Paling tidak, bagi elite Kesultanan Ternate dengan adanya kehadiran negara bangsa (*nation state*), akan menjadi ancaman tiga pilar penyangga supermasi politik dan ekonomi, yakni; *pertama*, tata hubungan politik yang bersifat klientelisme antara bangsawan dengan kawulanya diruntuhkan melalui sebuah revolusi nasionalisme yang kemudian melakukan pemisahan kalangan aristokrat-feodal dari basis kekuasaan politiknya serta memperkenalkan konsep kewarganegaraan untuk menggantikan konsep kawula. *Kedua*, tata hubungan ekonomi yang dijalin dengan kawulnya menjadi longgar akibat diterapkan politik hukum agrarian yang menganjurkan privatisasi tanah serta pergeseran tata produksi dominan dari feodalistik ke tata produksi kapitalistik. *Ketiga*, nilai-nilai tradisional kaum elite tradisional yang cenderung bersifat askriptif harus menghadapi nilai-nilai meritokrasi yang dibawa modernitas. Misalnya, jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melainkan harus didasarkan atas kompetensi tertentu.¹

Sejarah menunjukkan partisipasi politik elite Kesultanan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946. Terbentuknya Negara Indonesia Timur kemudian menjadi inspirasi politik bagi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah (Sultan Ternate

¹ AAG. Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. (Yogyakarta, IRE Press, 2004).

ke-47), untuk melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, dengan mengikuti konferensi Malino dan Denpasar sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara sekaligus merupakan salah satu disainernya. Sebagai tokoh federalis yang memperjuangkan pembentukan Negara Indonesia Timur dari konferensi Malino hingga Denpasar, maka dalam perkembangannya pada tahun 1949, Iskandar Jabir Syah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri NIT pada kabinet J.E. Tatengkeng (27 Desember 1947-14 Maret 1950).

Realitas politik menunjukkan, tatkala rezim Soekarno berkuasa, elite Kesultanan Ternate mengalami pembatasan. Pilihan politik Sultan Ternate ke-47 Iskandar Djahir Sjah (1929-1975), dalam mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook pada 1946, berimplikasi diasingkannya ke Jakarta pada 1950, karena dituduh sebagai tokoh federalis. Perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan inilah, mendorong elite kesultanan tidak mendukung partai pemerintah Soekarno pada pemilu 1955. Pilihan politik tersebut tentu tidak menguntungkan posisi mereka, karena harus menghadapi, tidak hanya rival politik lokal, namun juga kekuatan nasional.²

Sikap konfrontatif elite kesultanan tersebut, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam membatasi peran politik mereka, seperti; *pertama*, pembubaran dewan raja-raja (badan eksekutif), terdiri dari Sultan Ternate, Tidore dan Bacan dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif) yang mendukung federalisme pada tahun 1950. Konsekuensinya elite kesultanan tidak lagi mempunyai instrumen legal-formal dalam mempengaruhi pemerintahan lokal. Kontrol mereka terhadap birokrasi kemudian digantikan oleh bupati yang dipilih oleh DPRD. *Kedua*, penghapusan Karesidenan Ternate dan pembentukan pemerintahan daerah tingkat II Maluku Utara, berdasarkan UU. No. 60 tahun 1958. Konsekuensinya penguasa di tingkat II (Bupati) tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya tetapi dipilih melalui pemilu dalam format politik modern. *Ketiga*, lahirnya Undang-Undang

² Rustam Hasim, *Sultan dalam Sejarah Politik Ternate, 1945-2002*. Ternate: LepKhair, 2018.

Pokok Agraria 1960 tentang pembatasan dan kepemilikan tanah atau pengambil alihan oleh negara terhadap tanah-tanah swapraja.

Selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI) menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate. Apakah beberapa kebijakan tersebut diatas, berpengaruh terhadap eksistensi politik mereka di Ternate atau sebaliknya. Faktanya, walaupun eksistensi politik mereka mendapatkan pembatasan. Namun secara kultural, tidak berdampak pada merosotnya kekuasaan elite kesultanan. Salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyan *jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan disitulah kami).

Dalam budaya Ternate, sultan sangat dihormati dan dipatuhi karena diyakini mewarisi kebesaran dan kewibawaan yang membawa pada kedamaian, keadilan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah kata kunci bahwa begitu pentingnya bangsawan dimata rakyat. Hubungan sosial tersebut bukan hanya bersifat *patron-clein*, namun pada dasarnya mencerminkan ciri budaya masyarakat yang bersifat khusus dalam menjaga hubungan antara masyarakat dan pimpinan dalam tradisi sosial Ternate. Hal ini tercermin dalam semboyan hidup masyarakat Ternate "*ino foma Makati nyinga, doka gosora se bualawa, om doro ya momote, fo magogoru fo madudara*" (mari kita berkasih sayang, seperti buah pala dan fulinya, matang bersama, gugur bersama, dilandasi kasih dan sayang).³

Sebagai salah satu kekuasaan tradisional yang masih tetap eksis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Menunjukkan peran politik elite Kesultanan Ternate dalam sejarah politik lokal di Indonesia memiliki pengaruh yang

³ Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009.

signifikan. Terutama pada masa kekuasaan rezim Soekarno dan Soeharto, elite Kesultanan Ternate selalu bergelut dengan krisis dan survivalitas. Mereka mampu mempertahankan posisi politik sebagai pusat anutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Daya tahan elite Kesultanan Ternate tidak hanya sebatas bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi juga menempati posisi dan memainkan peran penting bahkan mengembangkan pengaruh dalam menentukan arah dan gerak perubahan tersebut. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan beberapa peristiwa politik Kesultanan Ternate pasca kemerdekaan seperti; Peta Kekuatan Politik Lokal Pasca Kemerdekaan, Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri NIT, *Republiken versus Vederalis*: Pemuda Ternate dan Penolakan Pembentukan NIT, dan Tokoh Federalis dan Pengasingan Iskandar Djabir Sjah. Semuanya akan diuraikan sebagai berikut.

B. PETA KEKUATAN POLITIK LOKAL PASCA KEMERDEKAAN

Proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945, bagi elite Kesultanan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia (RI), tentu menjadi ancaman supermasi politik dan ekonomi mereka. Peran dan kedudukan kaum elite yang telah berabad-abad dinikmati, mendapat tantangan dengan dibangunnya ideologi negara kesatuan yang mengedepankan basis loyalitas pada negara. Namun demikian, hubungan politik antara elite Kesultanan Ternate dengan pemerintah Hindia Belanda dapat dikatakan terjalin dengan baik.

Realitas menunjukkan selama pendudukan Jepang di Ternate 1942-1945, Sultan Ternate ke-47 Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya diungsikan ke Brisbane Australia atas perintah H.J. van Mook hingga kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 27 September 1945 Sultan Iskandar Djabir Sjah kembali ke Ternate, dan dilantik sebagai Residen Maluku Utara dengan pangkat Letnan Kolonel KNIL. Pada saat yang sama, status Ternate yang awalnya sebuah *afdeling* dinaikan statusnya menjadi Karesidenan Ternate.⁴

⁴ Rustam Hasim dan Mustafa Mansur, "Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950". Jurnal ETNOHISTORI Vol.II. No.1. April 2015. Fakultas Sastra, Universitas Khairun Ternate.

Kehadiran Sultan Iskandar Djabir Sjah sebagai Residen Maluku Utara, mendapat reaksi dari tokoh-tokoh dan pejuang pro-republik.⁵ Mereka menilai Sultan Iskandar Djabir Sjah adalah boneka Belanda, karena sejak awal proses penetapannya sebagai sultan sudah diintervensi dan mendapat restu dari Pemerintah Hindia Belanda. Mereka menilai pengangkatannya sebagai Residen sebagai strategi Pemerintah Hindia Belanda agar tetap kembali menguasai daerah koloninya.⁶

Sikap sultan Iskandar Djabir Sjah yang loyal terhadap Pemerintah Hindia Belanda, mulai berkembang menjadi gerakan politik yang menentang kembalinya Pemerintah Hindia Belanda di Ternate dan pemerintahan *swapraja*. Kondisi inilah melahirkan dua kelompok yang berbeda secara ideologi dan politik yaitu kelompok *swapraja* (bangsawan) dan kelompok pro-republik. Dukungan Belanda yang diberikan terhadap sultan, memunculkan sikap perlawanan dari tokoh pro-republik. Beberapa tokoh pro-republik seperti; Arnold Mononutu, Chasan Boesoerie, Abjan Soleman, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, Umar Assagaf, Abd. Rahman Zougira, Muhammad Abd. Rahman, dan Habib Ali Syeh Abubakar melakukan pertemuan pada September 1945. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain. *Pertama*, melarang kehadiran Belanda di Ternate. *Kedua*, menuntut dihapusnya daerah *swapraja* Ternate yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. *Ketiga*, mensosialisasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Hal ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat Maluku Utara belum mengetahui berita kemerdekaan RI.⁷

Untuk meredam kelompok pro-republik, pada bulan Nopember 1945 Sultan Iskandar Djabir Sjah sebagai Residen Maluku Utara mengundang Arnold Mononutu dan Chasan Boesoerie⁸ di istana Kesultanan Ternate. Sultan mengajak kedua tokoh pro-republik tersebut untuk membentuk partai politik yang bercorak *rijksverband* sehingga dapat berkerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun, saran dari sultan Iskandar Djabir Sjah tersebut ditolak. Setelah

⁵ Lihat Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta: tanpa Tahun, hlm. 8-11.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁷ Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007.

⁸ Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta: tanpa Tahun.

pertemuan tersebut, Iskandar Djabir Sjah mendirikan partai yang berhaluan *rijksverband* yang dinamakan PASMO (Partai Sedjarah Maluku Utara). Partai ini dipimpin oleh M. Nasir, saudara Sultan Iskandar Djabir Sjah, dengan beranggotakan Hasan Ayanhar dan Dano Syafei. Pasmu merupakan organisasi politik pertama yang didirikan oleh bangsawan Kesultanan Ternate pada awal kemerdekaan.

Sejak saat itu, suhu politik di Ternate sedang ‘hangat’, para pemuda pro-republik kemudian merespon membentuk organisasi tandingan. Pada tanggal 20 Desember 1945 para pemuda mendirikan organisasi politik lokal yang dinamakan Persatuan Indonesia (PI) yang diketuai oleh M.A. Kamaruddin⁹, beranggotakan Arnold Mononutu, Chasan Boesoirie, Abjan Soleman, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, Umar Assagaf, Abd. Rahman Zougira, Muhammad Abd. Rahman, dan Habib Ali Syeh Abubakar. Dalam perjuangan politiknya, Persatuan Indonesia adalah partai politik lokal pertama yang lahir dikawasan Timur Indonesia dengan tujuan memberi dukungan kepada Negara Republik Indonesia (RI). Organisasi ini dipakai sebagai alat untuk mengkritik kehadiran kolonial Belanda yang sudah lama berkuasa di Maluku Utara dan daerah-daerah lain di Timur Indonesia¹⁰. Dalam perkembangannya, PI mengalami perkembangan yang pesat, hingga di akhir tahun 1947 PI telah mempunyai cabang di luar Kota Ternate, seperti; Tobelo, Galela, Tidore, Bacan, Makian, Sanana, Weda, dan Jailolo dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000. orang¹¹.

Dalam menyebarkan informasi dan perjuangannya, mereka mendirikan surat kabar yang bernama “*Menara Merdeka*”. Melalui Menara Merdeka, mereka menyebarkan Proklamasi kepada masyarakat agar bangkit dan menghadapi penjajah yang ingin berkuasa kembali di Maluku. Koran ini tidak hanya diedarkan di Maluku Utara, tetapi juga diedarkan ke Minahasa (Sulawesi Utara), dan Maluku bagian Selatan. Melalui Partai Persatuan Indonesia dan Menara Merdeka para pemuda selalu memonitor kejadian-

⁹ Hamid Kotambunan, *Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme*. (Jakarta: Gamalama Media, 2003), hlm 12-14.

¹⁰Adnan Amal, *op.cit.*, hlm, 321.

¹¹*Ibid.*, hlm, 327.

kejadian yang terjadi di Jakarta dan kemudian disampaikan kepada masyarakat di Maluku Utara. Pada setiap pemberitaannya, surat kabar Menara Merdeka sangat aktif menghidupkan semangat perjuangan dan sikap anti Belanda¹².

Pada tanggal 9 Januari 1946, partai Persatuan Indonesia mengadakan kongres ke-2 di Ternate. Kongres tersebut akhirnya memilih Chasan Boesorie sebagai ketua dan Arnold Manonutu sebagai sekertaris. Terpilihnya kedua tokoh tersebut, PI tampil sebagai organisasi yang sangat tegas menentang seluruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Maluku Utara. Dalam laporan Residen Maluku Utara pada tanggal 15 April 1946, Iskandar Djabir Sjah, menyebutkan bahwa PI telah mendongkrak kesadaran politik rakyat Maluku Utara sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak Pemerintah Hindia Belanda di Ternate. Pada tanggal 12 Juli Residen Iskandar Djabir Sjah memanggil Chasan Bosorie sebagai ketua PI, memintanya bahwa dalam perjuangannya tidak boleh menimbulkan kekacuan. Dalam ini Iskandar Djabir Sjah berkata kepada Chasan Boshorie “*Dokter ik kan niet op tegen de speldeprikken van U. Iktreed af een word van U is volduerde om Noord Moluccan in opstand te brengen*”¹³.

Dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal H.J. van Mook berupaya mengembalikan pemerintahan koloni diatas tanah jajahannya di Indonesia dengan membentuk Negara-negara bagian. Untuk mewujudkan rencananya itu, van Mook bertindak sendiri untuk melaksanakan Konferensi Malino di Makasar 1946. Tujuannya mau mendirikan negara-negara bagian yang dapat dipakainya sebagai alat untuk menandingi republik dengan sasaran menjadikan wilayah Indonesia Timur sebagai tujuan utama¹⁴. Dalam konferensi tersebut utusan yang hadir mewakili Maluku Utara terdiri atas; Chasan Boesorie dari Persatuan Indonesia, Salim Fabanyo dari Partai Sedjarah Maluku Utara, dan Residen Maluku Utara Sultan Iskandar Dabir Sjah.

¹² R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975.

¹³ Dikutip dari Arsip pribadi yang ditulis langsung oleh Iskandar Muhammad Djabir Sjah, berupa riwayat hidup singkat pada tanggal 24 Agustus 1950.

¹⁴ Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta; UGM Press, 1985.

C. SULTAN TERNATE ISKANDAR DJABIR SJAH: DARI KONFERENSI MALINO HINGGA MENJADI MENTERI DALAM NEGERI NIT

Pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Belanda di Den Haag maupun pemerintah Hindia Belanda dipengasingan bawah pimpinan Letnan Jenderal H.J. van Mook yang berkedudukan di Brisbane (Australia) mempunyai rencana mengembalikan pemerintahan koloni diatas tanah jajahannya di Indonesia dengan membentuk negara-negara bagian (federalism)¹⁵. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 1945 Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Brisbane membuat perjanjian dengan Inggris yang pada waktu itu ditugaskan untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang yang ada di Indonesia. Dalam perjanjian itu pihak Belanda di izinkan memegang kekuasaan sipil di Indonesia.¹⁶

Pada tanggal 16 Juli-25 Juli 1946 diselenggarakan konferensi Malino¹⁷ dibuka dengan resmi oleh Gubernur Jenderal Dr.H.J van Mook atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Konferensi ini diikuti oleh 39 perwakilan dari berbagai daerah seperti; Bali, Lombok, Riau, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Borneo Barat, Borneo Timur, Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Neeuw Guinea (Irian), Flores, Timor, Sumba, Sumbawa, Borneo Selatan, Maluku Selatan dan Maluku Utara diwakili oleh Chasan Boesoirie (mewakili Partai Indonesia PI), Salim A. Fabanyo (mewakili Partai Sejarah Maluku Utara Pasmu), dan Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah (Residen Ternate).¹⁸ Para utusan yang

¹⁵ Lebih jelasnya lihat George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme and Revolusi Indonesia*.(ter). Ismail Muhammad dan Zakaren Abdul Rashid.(Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).

¹⁶ Arthur A. Schillers, *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949*, Bandung, 1989, hlm. 126.

¹⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 96.

¹⁸ Iskandar Muhamad Djabir Syah adalah sultan Ternate ke-47. Iskandar Muhamad Djabir Syah merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Hi Usman syah (Sultan Ternate 45) dan putri Mihir (bangsawan Susupu). Ia dilahirkan di Ternate pada tanggal 4 Maret 1902. Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1912 dengan memasuki Sekolah Melayu. Setelah tamat dari sekolah dasar pada tahun 1915, ia melanjutkan ke *Europese Lagere School* (SMP) di Ternate. Akan tetapi tidak tamat karena ayahnya Sultan Usman di asingkan oleh Belanda ke Bandung karena di tuduh terlibat pemberontkan di Jailolo (Halmahera Barat). Pada tahun 1917 Iskandar Muhamad Djabir melanjutkan sekolahnya ke MULO di Batavia. Selama menimba ilmu di Batavia banyak bertemen dengan tokoh-tokoh pergerakan salah satunya haji Agus Salim, yang mengajaknya untuk bergabung dengan organisasi politik PSI dari tahun 1920-1925. Dari sinilah Iskandar Muhamad Djabir mengenal politik secara langsung sehingga mempengaruhi pemikiran politiknya di kemudian hari. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui riwayat hidup Iskandar Muhamad Djabir Sjah dari masa kecil, masa perjuangan, hingga akhir hayatnya. Silahkan baca Irza Arnita Djafaar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).

hadir pada konferensi tersebut didominasi raja-raja dan pegawai Belanda yang memerintah didaerahnya masing-masing.

Dalam pidato pembukaannya, H.J. van Mook mengatakan bahwa gagasan Pemerintah Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino telah disampaikan kepada Perdana Menteri RI Sutan Syahrir. Pada Konferensi tersebut, J.H. van Mook mengungkapkan niatnya untuk membangun “Negara Federalis Indonesia”¹⁹ yang meliputi Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Besar. Dalam konferensi itu direncanakan bahwa Negara Indonesia Timur akan diperintah suatu kabinet parlementer dan dikepalai seorang presiden. Selain itu akan dibentuk suatu dewan perwakilan rakyat. Semuanya berkedudukan di Makasar.²⁰

Setelah pidato pembukaan, H.J van Mook meminta kepada para peserta konferensi untuk memberi tanggapan mengenai gagasan pembentukan Negara Indonesia Timur. Diantara para peserta yang memberi tanggapan pada konferensi tersebut adalah Sultan Ternate Djabir Syah. Pada kesempatan itu Sultan Ternate Djabir Sjah, memberi pandangan dengan mengatakan bahwa keinginan penduduk swapraja Ternate, Tidore dan Bacan agar konferensi dapat mengambil keputusan-keputusan bersejarah bagi Indonesia. Apabila rakyat Maluku Utara memperoleh kemerdekaanya, ia akan setara dengan rakyat Nederland (Belanda) dalam ikatan persaudaraan. Menurutnya, kesamaan derajat dan status antara Indonesia dan Belanda inilah yang ingin dicapai. Ia kemudian mengusulkan bahwa bila parlemen telah terbentuk untuk Indonesia Timur dan Borneo (Kalimantan), hendaklah dibentuk senat atau majelis tinggi yang anggota-anggotanya diambil dari unsur swapraja (*zelfbestuurders*), pemimpin persekutuan hukum, dan pemuka masyarakat.²¹

Selain Sultan Ternate Djabir Sjah, para peserta lain yang memberi tanggapan yakni; E.D. Dengah (Minahasa), J.P. Mangula (Minahasa), Sarapie (Sangir Talaud), Katili (Gorontalo), R.J. Matekohy (Maluku Selatan), Kaisepo

¹⁹ Adnan Amal, *op.cit.*, hlm, 301.

²⁰ Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta Bio Pustaka, 2005.

²¹ Memoar Iskandar Muhammad Djabir Syah. (Jakarta, tanpa penerbit, 1950), hlm 9-11.

(Papua), Nadjamuddin Daeng Malawe (Sulawesi Selatan) dan I Gusti Bagus Oka (Bali). Semua pembicara tersebut berpendapat yang sama yakni menyetujui kerjasama yang erat antara Indonesia-Belanda. Karena itu, pemerintah Belanda harus memperhatikan secara serius pendapat dan pikiran kalangan rakyat Indonesia Timur dan menekankan bahwa Indonesia Timur sebagai sebuah wilayah kesatuan harus tetap berada dibawah bendera Belanda. Mereka juga menyetujui usulan dari Maluku Selatan dan Minahasa yang menghendaki bahwa jika Negara Indonesia Timur telah dibentuk, maka Kalimantan harus dipisahkan sehingga federasi Indonesia hanya meliputi; Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur terdiri atas Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.²²

Konferensi Malino adalah peletak dasar terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). Hal ini dapat dilihat semua wakil daerah (utusan) sepakat untuk menerima sistem federal sebagaimana disampaikan wakil-wakil mereka seperti; Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, termasuk dan Maluku Utara.²³ Najamudin Daeng, utusan Sulawesi Selatan menyatakan daerahnya dapat menerima seluruh kesimpulan konferensi. Menurutnya, titik tolak sebuah Negara Indonesia Serikat melalui aliansi dengan Belanda harus diwujudkan tanpa perlu adanya jangka waktu tertentu.²⁴

Sesuai kesepakatan Konferensi Malino bahwa konferensi kedua (sebagai kelanjutannya) akan diadakan kurang lebih empat bulan di Denpasar²⁵. Konferensi ini mempunyai wewenang berdasarkan keputusan Konferensi Malino untuk menyusun tata pemerintahan dan ketatanegaraan baru di wilayah Timur Besar melalui perundingan-perundingan dan pembicaraan-pembicaraan dengan wakil-wakil Pemerintah Belanda yang diprakarsai oleh Dr H.J. van Mook. Menurut Audrey R. Kahin, Konferensi Denpasar merupakan embrio lahirnya RIS yang merupakan prototipe negara–negara boneka yang kemudian secara terus-menerus dibentuk Belanda²⁶.

²² Lebih jelasnya G. Kolff, *De Conferentie Te Denpasar 7-24 December 1946. Deel I: Handelingen.* (Batavia: tanpa tahun penerbit), hlm. 7-12.

²³ Lebih jelasnya lihat Arnita Djafar, *op.cit.*, hlm. 34-35.

²⁴ Irza Arnita Djafar, *ibid.*, 37.

²⁵ Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 75-77.

²⁶ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan.* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 54.

Konferensi Denpasar di mulai 7-24 Desember 1946, diikuti oleh 55 perwakilan utusan daerah dan tambah 15 utusan dari golongan minoritas (Cina dan Timur Asing lainnya) sehingga berjumlah 70 orang peserta. Untuk wilayah timur besar dibagi atas 13 daerah. Tiap-tiap daerah memilih wakilnya berdasarkan tata cara pemilihan yang ditentukan oleh daerah-daerah itu sendiri. Misalnya daerah-daerah yang telah memiliki dewan perwakilan seperti Bali, Sulawesi Selatan, Maluku Selatan, dan Minahasa. Maka kewenangan itu dipilih oleh dewan perwakilan yang bersangkutan. Sementara daerah-daerah lain yang tidak mempunyai dewan perwakilan maka dibentuklah dewan pemilih yang diberi wewenang untuk memilih wakil-wakil mereka untuk menghadiri konferensi Denpasar²⁷. Delegasi Maluku Utara diwakili oleh Iskandar Djahir Sjah (Sultan Ternate) dan Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore)²⁸.

Jika pada Konferensi Malino pembicaraan-pembicaraan masih bersifat umum dan menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia pada umumnya. Sementara dalam Konferensi Denpasar, pembicaraan dipusatkan pada satu masalah pokok yaitu pembentukan susunan ketatanegaraan di wilayah Indonesia Timur. Dalam konferensi Denpasar inilah van Mook memaksakan ide federalismenya. Apa yang dilakukan tanpa kerjasama dengan pihak Republik Indonesia sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati. Akhirnya konferensi ini diakhiri tanggal 24 Desember 1946 yang melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan menetapkan Makasar sebagai Ibukotanya²⁹. Kongres juga menetapkan bahwa Negara Indonesia Timur akan diperintah oleh suatu kabinet parlementer yang dikepalai oleh seorang Presiden. Tokoh yang terpilih menjadi Presiden adalah Tjokorde Gde Rake Soekawatidari Bali³⁰. Sementara yang menjadi Perdana Menteri adalah Nadjamoeddin Daeng Malewa dan Ketua Parlemen Sementara NIT adalah Tadjuddin Noer yang berasal dari Makasar³¹. Kabinet Nadjamoeddin ini sangat tampak campur tangan dari van Mook. Hal ini terlihat dari manifesto politik yang

²⁷ Lihat G. Kolff, *De Conferentie Te Denpasari 7-24 Desember 1946*, Deel I. Handelingenn (Batavia. Tanpa tahun), hlm. 51-52.

²⁸ Lebih jelasnya lihat Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, *op.cit.*, hlm. 23-25.

²⁹ Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 105-107.

³⁰ Lihat R. Nalanan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*. (Jakarta: Gubung Agung, 1981), hlm. 67-69.

³¹ Irza Arnita Djafar, *op.cit.*, hlm. 34-35.

dikeluarkan dengan jelas dimana Nadjamoeddin berjanji akan melaksanakan segala rencana yang bersumber pada van Mook.

Sejak Konferensi Malino sampai dengan Konferensi Denpasar, Iskandar Djabir Sjah selalu berpartisipasi dengan menyetujui konsep negara federal, dan secara konsisten selalu mempertahankannya karena sesuai dengan ideologi politik yang dianutnya. Ia selalu berpegang pada prinsip itu karena memandang situasi sosiologis-antropologis bangsa Indonesia Timur yang bersifat majemuk maka konsep federalis yang cocok untuk bangsa Indonesia³². Menurut Mudafar Syah, pemikiran Iskandar Djabir Syah pada tahun 1950-an didasarkan pada pandangannya, mengingat beragamnya penduduk, kebudayaan, dan kondisi geografis, Indonesia lebih baik berbentuk federasi daripada negara kesatuan³³.

Sejak awal pembentukan Negara Indonesia Timur yang digagas oleh van Mook atas nama Pemerintah Belanda. Iskandar Muhammad Djabir Sjah telah menunjukkan partisipasinya. Partisipasinya sungguh beralasan karena secara politik ia memiliki kedekatan dengan Pemerintah Belanda atas jasa-jasa yang diberikan kepadanya. Misalnya, pada 1929 ia dilantik menjadi Sultan Ternate ke-47, bahkan pada saat Jepang menduduki Pulau Ternate, Iskandar Muhammad Djabir Sjah bersama keluarganya diungsikan Brisbane Australia pada September 1945. Setelah kepulangannya dari Australia, Iskandar Muhammad Djabir Sjah diangkat sebagai kepala daerah (residen) dengan pangkat Kolonel *Tituler der Koninghen Orange van Nasau*³⁴.

Sebagai tokoh yang mendukung pembentukan NIT, maka dalam perkembangannya, pada tanggal 27 Desember 1949 Iskandar Djabir Syah dilantik oleh Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), Tjokorde Gde Rake Soekawati dalam Kabinet Tatengkeng³⁵. Adapun susunan Kabinet J.E. Tatengkeng sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. J.E. Tatengkeng | Perdana Menteri merangkap
Menteri Pendidikan |
|--------------------|---|

³² Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah. (Jakarta, tanpa penerbit, 1950), hlm 3-5.

³³ Irza Arnita Djafar, , *op.cit.*, hlm. 57.

³⁴ Mengenai riwayat Iskandar Djabir Syah dalam pembentukan negara Indonesia Timur, lihat Irza Arnita Djafaar, *op.cit.*, hlm.117-121.

³⁵ Rustam Hasim, Sultan Iskandar Djabir Syah: from Malino Conference To The Minister Of Internal Affairs Of Negara Indonesia Timur". Jurnal Paramita, Vol.26, No.2, 2016

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 2. Iskandar Moh. Syah, Sultan Ternate | Menteri Urusan Dalam Negeri |
| 3. Drs. Tan Tek Heng | Menteri Keuangan |
| 4. Abdul Rajab Daeng Massikki | Menteri Perekonomian |
| 5. I.H. Doko | Menteri Penerangan |
| 6. Mr. S. Binol | Menteri Sosial |
| 7. Mr. S. Binol | Menteri Kesehatan ad interim |
| 8. Ir. D.P. Diapari | Menteri Pekerjaan Umum |
| 9. Mr. Dr. Ch. R.S. Soumokil | Menteri Kehakiman |

Kabinet Tatengkeng merupakan kabinet kelima dari dalam wadah Negara Indonesia Timur (NIT). Kabinet ini merupakan perpanjangan tangan dari kabinet sebelumnya (Anak Agung Gde Agung). Walaupun masa kerjanya singkat hanya 4 bulan (27 Desember 1949-14 Maret 1950). Namun beberapa programnya dapat dicapai yaitu pembentukan daerah-daerah otonom di kawasan Timur yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Sementara. Pembentukan Komisariat Negara, dari tingkat bawah sampai tingkat atas dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Kabinet Tatengkeng 14 Maret 1950. Sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Tatengkeng, Iskandar Djabir Syah, bertekad untuk menyusun tertib hukum baru dengan pembentukan susunan ketatanegaraan di Negara Indonesia Timur sedemikian rupa dari tingkat bawah sampai atas sehingga diwujudkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan bercorak kebangsaan. Pembentukan daerah-daerah dengan otonomi yang luas dan kekuasaan serta wewenang yang mantap di mana pemerintah swapraja memainkan peranan yang penting didampingi oleh dewan yang dipilih oleh rakyat telah membuktikan sudah dapat diwujudkannya di wilayah Negara Indonesia Timur susunan pemerintahan yang sesuai dengan kepribadian daerah-daerah itu, bercorak kebangsaan dan tersusun demokratis³⁶.

Memasuki akhir Kabinet J.E. Tatengkeng, situasi dan keamanan tidak kondusif dengan munculnya berbagai pemberontakan seperti pertikaian antara APRIS dan TNI mendorong sejumlah daerah otonom di wilayah NIT tampil memproklamasikan daerahnya keluar dari NIT dan menggabungkan daerahnya

³⁶ Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah, *op.cit*, hlm. 9-10.

menjadi bagian dari RI. Misalnya pada tanggal 26 April 1950, Andi Idjo Karaeng (Sulawesi Selatan), memproklamkan Sulawesi Selatan menjadi satu bagian provinsi RI³⁷. Hal yang sama juga dilakukan pula oleh Adjuba Wartabone untuk daerah Sulawesi Utara. Di samping itu, pemberontakan Andi Aziz di Makasar awal April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet NIT. Pada tanggal 20 April tokoh Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Pupella, mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT. Menurut Edward L. Poelinggomang, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa aliran politik uniteralis menolak sepenuhnya pembentukan Negara federal. Selain itu para pemuda pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan³⁸.

Perkembangan demikian tentunya mempengaruhi suasana politik di NIT dan memberi dorongan besar kepada golongan unitaris untuk mewujudkan tujuannya yakni membubarkan NIT. Atas dasar itulah, dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan ke-5 secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)³⁹.

D. REPUBLIKEN VERSUS VEDERALIS: Pemuda Ternate dan Penolakan Pembentukan NIT

Konferensi Denpasar yang diakhiri 24 Desember 1946 melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT). Para peserta konferensi ditetapkan sebagai anggota Parlemen Sementara, menunggu pelaksanaan pemilihan umum untuk pembentukan sebuah parlemen yang defenitif. Tadjuddin Noor dipilih sebagai Ketua Parlemen. Perdana Menteriya ialah Nadjamuddin Daeng Malewa, dan Tjokorda Gde Raka Sukawati sebagai Presiden NIT. Dengan dibentuknya NIT,

³⁷ Lihat Edward L. Poelinggomang, *Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah*. (Yogyakarta: Ombak: 2004), hlm. 67-69.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 228-229.

³⁹ Rustam Hasim, "Sultan In The History Of Ternate 1946-2002". Vol 4. 1 Juni 2016. Jurnal Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

bagi van Mook sebagai fase awal dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

Pembentukan NIT tidak mendapat sambutan yang baik dari kalangan pro-Republik Indonesia. Sejak Konferensi Malino dan Denpasar dianggap sebagai suatu usaha pihak Belanda untuk menggalang dukungan dari wakil-wakil daerah diluar Jawa sebagai strategi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan Konferensi Denpasar dianggap akal-akalan baik pada sisi penyelenggaraan maupun penetapan utusan-utusan daerah⁴⁰. Namun demikian, terdapat sebagian tokoh pro-Republik ikut mendukung pembentukan NIT, karena naskah Persetujuan Linggajati menegaskan bahwa “Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula di dalam atau ke dalam daerah republik” (pasal 1)⁴¹.

Di Ternate, reaksi terhadap Pembentukan NIT muncul dari tokoh-tokoh Persatuan Indonesia yang terdiri dari; Arnold Mononutu, Chasan Bosorie, M.S. Jahir, Abjan Soeleman dan Abubakar Bahmid. Melalui Surat Kabar Menara Merdeka, mereka mengkritik pembentukan NIT dengan mengatakan “bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat hanya merupakan proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Persatuan Indonesia hanya berdiri di belakang RI dengan Presiden dan wakilnya Soekarno-Hatta dan Perdana Menterinya Sutan Syahrir”⁴².

Reaksi yang sama juga terjadi di Ambon, melalui Partai Indonesia Merdeka (PIM), para pemuda yang pro-Republik dengan tegas menolak pembentukan NIT. Mereka mengatakan “pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai suatu konspirasi politik Belanda, oleh karena itu rakyat Maluku hanya bergabung dengan Republik Indonesia berdasarkan pasal 3 Perjanjian Lingarjati

⁴⁰ R. Nalanan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*. Jakarta: Gubung Agung, 1981.

⁴¹ Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiah adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, Ternate: Depdikbud, 1982.

⁴² R.Z. Leirissa, *op.cit.* hlm. 65.

yang dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan adanya Negara Indonesia Timur⁴³.

Negara Indonesia Timur merupakan negara boneka pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia Serikat (RIS). Sebagai negara bagian yang baru dibentuk, maka para anggota senat masih bersifat sementara dan diambil dari utusan-utusan daerah⁴⁴, sambil menunggu pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya secara defenitif. Negara boneka (NIT) ini, meskipun masih mengikutsertakan sejumlah bekas pejabat Belanda dalam organisasi pemerintahan, namun telah melampungkan dan mengikutsertakan semua aliran yang berkembang dalam pemerintahan.

Kebijakan itu melampungkan aliran *republikan* (uniteral) untuk terus berjuang secara terbuka. Pendirian partai politik di era itu dimungkinkan karena ketika itu NIT menganut dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan membuka peluang bagi aliran politik⁴⁵. Dengan demikian, partai-partai politik dapat berlomba untuk memenangkan perolehan kursi di parlemen NIT (pusat) untuk masuk dalam Badan Perwakilan Rakyat Sementara (sekarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di setiap daerah otonom. Untuk memenuhi hal tersebut, maka didirikanlah partai sebagai instrumen perjuangan. Sebagai tokoh pro-Republik dan sekretaris Persatuan Indonesia maka Arnold Mononutu⁴⁶ dipilih sebagai utusan anggota parlemen yang mewakili Maluku Utara bersama Sultan Iskandar Djabir Syah yang pro-federalis.

Di dalam Perlemen NIT terdapat tiga fraksi yang berbeda secara ideologi yaitu *pertama*, fraksi Demokrat, adalah fraksi yang pro pemerintahan. Fraksi ini menginginkan suatu negara berbentuk federal juga menginginkan ikatan yang lebih erat lagi dengan Belanda. Perjuangan mereka berkisar pada politik yang dijalankan Kabinet Nadjamoeddin yang pro kepada Belanda⁴⁷. Fraksi Demokrat didukung oleh beberapa partai seperti PASMO dari Ternate, Partai Demokrat,

⁴³ Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978.

⁴⁴ R. Naelan, *op.cit.*, hlm. 154.

⁴⁵ Edwrd L Poelinggomang, *op.cit.*, hlm. 221.

⁴⁶ R. Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*. (Jakarta: Gunung Agung, 1981).

⁴⁷. Lebih jelasnya lihat R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 141-142.

Singa Minahasa (Manado), Sembilan Serangkai (Ambon), Lima Serangkai (Timor), dan Gabungan Sembilan Serangkai. Kelompok ini dinamakan kelompok van Mook⁴⁸. Partai-partai tersebut dalam perkembangannya ketika NIT bubar, mereka menolak bergabung dengan RI yang kemudian membentuk kelompok separatis yang dikenal Republik Maluku Selatan (mengenai RMS dijelaskan kemudian). *Kedua*, fraksi progresif merupakan fraksi oposisi. Fraksi Progresif ini diketuai oleh A. Mononutu (utusan PI dari Maluku Utara). Fraksi ini, selain bertujuan memperjuangkan kemakmuran di Indonesia Timur adalah memperjuangkan integrasi Indonesia. Dan *ketiga*, fraksi Nasional adalah fraksi netral.

Dalam perkembangannya pada tanggal 20 Desember 1947, organisasi-organisasi pergerakan pro-Republik melakukan kongres di Makassar. Kongres tersebut memutuskan pembentukan Partai Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI). Arnold Mononutu dipilih menjadi ketua, J.E. Taengkeng sebagai wakil ketua, dan Henk Rondonuwu sebagai sekretaris. GAPKI terdiri atas gabungan dari organisasi-organisasi pro-republik yakni: Barisan Nasional Indonesia (Manado), Gerakan Indonesia Merdeka (Ternate), Persatuan Indonesia (Ternate), Partai Indonesia Merdeka (Ambon), Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gorontalo), Badan Penyelenggaraan Suara rakyat (Gorontalo), Partai Kedaulatan (Makasar), Partai Kebangsaan (Makasar), Partai Buruh Indonesia (Makasar), Partai Warganegara Indonesia (Makasar), PSSI (Indonesia Timur), dan Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (Makassar)⁴⁹. Tujuan partai ini jika sebelumnya tuntutan mereka untuk bekerjasama dengan pihak Belanda dalam membentuk negara federal (sesuai perjanjian Linggajati), maka kini tujuannya adalah Negara Indonesia yang berdaulat dan makmur⁵⁰.

GAPKI yang dipimpin oleh Arnold Mononutu merupakan aliansi politik terbesar dan terkuat di Indonesia Timur. Sebagai sebuah kekuatan oposisi GAPKI sangat disegani dan diperhitungkan pemerintah NIT⁵¹. Setelah dipilih

⁴⁸ Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate: Sejarah Sosial Ekonomi & Politik*. Yogyakarta: Ombak; 2006.

⁴⁹ Herry RD. Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate, Yayasan Kie Raha, 2003.

⁵⁰ Adnan Amal, *op.cit.*, hlm. 213.

⁵¹ Koran *.Indonesia Timoer*. Makasar, 25 Pebruari "Arnold Mononutu: Indonesia Timoer tidak bisa terpisah dari Republik".

menjadi ketua GAPKI, Arnold Mononutu dan kawan-kawannya menjadikan partai untuk meningkatkan perjuangan pro-Republik disamping perjuangan dalam parlemen. Adapun pedoman perjuangan GAPKI ialah:

1. Soekarno-Hatta adalah lambang perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia.
2. Yogyakarta adalah lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Sekali ke Yogya tetap ke Yogya⁵².

Pada 9 Januari 1948 PI mengadakan Kongres ke-II di Ternate untuk memilih kepengurusan baru. Dalam kongres tersebut, Chasan Boesorie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Arnold Mononutu yang ditunjuk sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara. Sebagai organisasi yang pro-Republik, maka PI dibawah pimpinan Chasan Boesorie menyatakan dukungan dan bergabung dengan Partai GAPKI yang dipimpin oleh Arnold Mononutu⁵³. Arnold Mononutu dalam dalam parlemen NIT mempunyai peranan yang strategis, selain menjadi ketua GAPKI, juga dipilih menjadi ketua Fraksi Progresif. Sehingga dalam perkembangannya parlemen NIT yang dikuasai Fraksi Progresif memiliki peran penting dalam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis.

Pada tanggal 23 Maret 1948, Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung mengunjungi Ternate. Pada malam harinya dilangsungkan jamuan makan malam oleh Residen Maluku Utara Iskandar Djabir Sjah di istana Kesultanan Ternate. Para pengurus PI dimotori Abjan Soelemen melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Anak Agung Gde Agung karena dianggap boneka Belanda. Dengan spanduk yang bertulisan "*go home duch man*" rombongan pawai menuju istana. Setiba di depan Benteng Orgaje, pawai dihadang oleh tentara KNIL. Dalam insiden ini, terjadilah perkelahian massal yang menyebabkan sejumlah simpatisan PI luka-luka. Sehubungan dengan itu, Anak Agung Gde Agung atas nama pemerintah NIT meminta maaf kepada PI dan rakyat Ternate. Akhirnya beberapa tentara KNIL dipindahkan ke Makasar⁵⁴. Dalam laporannya ke Anak Agung Gde Agung, Residen Maluku Utara, Iskandar Djabir Sjah mengatakan

⁵² R. Nalenan, *op,cit*, hlm. 200.

⁵³ *Menara Merdeka*. Ternate " Bung Mononutoe maoe Kemana?"

⁵⁴ *Indonesia Timoer. Makasar*, 1 April 1948 "Keonaran di Ternate"

bahwa PI telah berhasil mendongkrak kesadaran politik masyarakat Maluku Utara.

Dalam perkembangannya kabinet Anak Agung Gde Agung digantikan J.E. Tatengkeng sebagai Perdana menteri. Dalam kabinet inilah, Iskandar Djabir Syah, Sultan Ternate dan Residen Maluku Utara diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (27 Desember 1949-14 April 1950). Akan tetapi kabinet ini tidak berlangsung lama, pada tanggal 20 April tokoh Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Pupella, mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT. Akibatnya, Perdana Menteri NIT J.E. Tatengkeng mengundurkan diri dan kabinet bubar.

Kabinet baru terbentuk dibawah Perdana Menteri Poetoehena. Pada era kabinet Poetoehena (10 Mei-16 Agustus 1950) telah muncul berbagai pemberontakan, diantaranya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar awal April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet NIT. Selain faktor tersebut pada awal bulan Maret, sebagaimana diberitakan Koran Soeloeh Rakyat, pergolakan dan pertentangan antara golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan dan terutama di Makasar berkobar dengan hebat sehingga timbul suasana yang sangat gawat. Dari golongan unitaris yang dipelopori oleh anggota-anggota parlemen Fraksi Kesatuan Nasional Indonesia, mendesak kepada pemerintah Negara Indonesia Timur segera dibubarkan dan dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia⁵⁵.

Dengan demikian, pada tanggal 17 Agustus 1950 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-5, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pembubaran RIS. Maka berakhirlah riwayat Negara Indonesia Timur⁵⁶. Akhirnya pihak Republikan-lah yang menang. Dengan demikian, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat terlaksana setelah selama empat tahun terhalang oleh kekuatan-kekuatan kolonialis di Negeri Belanda yang dibantu oleh pengikut-pengikutnya di Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan dari Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada saat yang sama,

⁵⁵ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. (Jakarta: Grafiti, 1990)

⁵⁶ Lihat Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, *et.al,op,cit.* hlm. 269.

⁵⁶ L. Katoppo, *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

⁵⁶ Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, *et.al,op,cit.* hlm. 269.

Komisi Tiga Negara (KTN) secara resmi mensahkan Maluku Utara sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Atas perjuangan dan jasa Arnold Mononutu dan Chasan Boesorie, Pemerintah Kota Ternate kemudian mengabadikan keduanya sebagai nama jalan dan nama rumah sakit.

E. TOKOH FEDERALIS DAN PENGASINGAN ISKANDAR DJABIR SJAH

Setelah bubarnya Negara Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan RI pada tahun 1950, Iskandar Muhammad Djabir Syah dipindahkan ke Jakarta karena dituduh sebagai tokoh federalis. Di Jakarta, Iskandar Muhammad Djabir Syah yang saat itu masih menjabat Residen Maluku Utara dimutasikan sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang sama jabatannya sebagai Residen Maluku Utara dicopot dan digantikan oleh Sultan Tidore, Zainal Abidin Alting.

Selama di pengasingan Jakarta (1950-1975), Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh *bobato nyagimo setofkange* (dewan delapan belas). Kekosongan itu berdampak pada merosotnya legitimasi kekuasaan elite istana (bangsawan) akibat hilangnya kontrol politik dan birokrasi di wilayahnya. Kapasitas mereka hanya sebatas pelengkap struktur pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh otoritas kepemimpinan yang berada ditangan sultan.⁵⁷

Begitu terbatas dan lemahnya kekuasaan dan kekuatan politik elite keraton (aristokrat) Kesultanan Ternate sehingga nyaris tidak banyak yang bisa dilakukan. Hampir semua akses yang mengarah pada kepentingan kekuatan lokal dipastikan terisolasi semuanya, pada saat ketiadaan sultan. Dengan demikian wilayah kekuasaan aristokrat hanya terbatas pada tembok-tembok istana. Walaupun masih memiliki birokrasi pemerintahan itupun hanya mengurus kepentingan-kepentingan rumah tangga keraton.

Dalam struktur kesultanan Ternate terdapat lembaga eksekutif yaitu *kolano* (sultan) dan para menteri-menterinya. Selama di Jakarta, Iskandar Djabir Syah memecat saudara lelakinya, Ikhtirajur Rahman *jogugu* (perdana menteri)

⁵⁷ Irza Arnita Djafar, *op.cit.*, hlm. 65.

dan mengangkat Noho Badi Madjid dari marga Tomaito sebagai *jogugu* (perdana menteri) baru kesultanan Ternate, untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan *adat se atorangi Jo ou ngofa ngare, doka tarupa sematubu* (sultan dan punggawa seperti terumpak dengan kepalanya). Keduanya sama-sama terikat akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam keutuhan yang tak terpisahkan, sebagaimana tergambarkan dalam falsafah Ternate yaitu *rubu-rubu fo ma moi-moi doka saya rako moi* (berbondong-bondong kita semua seperti rangkaian kembang)⁵⁸.

Dalam struktur Kesultanan Ternate *jogugu* merupakan orang kedua setelah sultan, dan keduanya sama-sama terikat akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam keutuhan yang tak terpisahkan, ibarat seperti pedang dengan sarungnya sebagaimana tertuang dalam falsafah Ternate *rubu-rubu fo ma moi-moi doka saya rako moi* (berbondong-bondong kita semua seperti rangkain kembang). Dengan fungsinya sebagai *jogugu* yang mengurus masalah pemerintahan, maka tugasnya adalah melantik beberapa kepala soa yang telah kosong selama ditinggalkan Iskandar Djabir Syah. Selain sebagai Perdana Menteri Noho Badi Madjid juga diangkat sebagai dewan perwakilan adat Maluku. Dengan fungsinya sebagai perdana menteri yang mengurus masalah keagamaan dan pemerintahan. Akan tetapi jabatan yang dipegang itu tidak berlangsung lama karena tidak mampu melerai keinginan-keinginan sesaat oleh para *bala kusu sekano-kano* (masyarakat umum) maka ia mengundurkan diri⁵⁹.

Agar tidak terjadi kekosongan perdana menteri (*jogugu*), maka Abdul Kadir Ahmad yang dipercayakan memegang panglima perjuangan menghadap Iskandar Muhammad Djabir untuk meminta *iddin kolano* (fatwa Sultan). Akhirnya Sultan Iskandar Djabir Syah mengeluarkan *fatwa kolano* mengenai pengangkatan empat pemangku adat baru yaitu; Haji Ahmad Yusuf Madjid sebagai *jogugu* (Perdana Menteri) dari marga Marsaoli, Haji Abdul Habib Djiko sebagai *hukum Soa Sio* (Jaksa Agung) dari marga Djiko. Samaka Ali diangkat sebagai *hukum Sangaji* (Menteri Dalam Negeri) dari marga Payahe, dan Saleh Badrun diangkat sebagai *tulilamo* (Sekertaris Negara) dari marga Tabala. Para

⁵⁸ Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009.

⁵⁹ Herry RD.Nachrawy, *op,cit.*,hlm. 34.

pemangku adat yang ditunjuk itu ditugaskan untuk menata *adat se atorang bala kusu sekano-kano* (menujunjung tinggi adat yang harus ditaati masyarakat)⁶⁰.

Selama di Jakarta, Sultan Iskandar Djabir Syah hanya sekali pulang ke Ternate, itu pun atas permintaan rakyat dan kepala Residen Maluku Utara, Zainal Abidin Alting. Permohonan tersebut disampaikan oleh 18 orang utusan kepada Menteri Dalam Negeri, dan permintaan ini dikabulkan untuk melakukan kunjungan ke Ternate hanya satu tahun. Pada tahun 1953, Sultan Iskandar Djabir Syah mengunjungi Ternate, tanah kelahirannya, daerah yang pernah dipimpin dan sangat dicintainya. Kedatangannya ditunggu oleh ribuan masyarakat Ternate dan disambut oleh Kepala Daerah, Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore). Selama di Ternate, Sultan Iskandar Djabir Syah melakukan kunjungan daerah-daerah di Maluku Utara. Selama dalam kunjungannya, Sultan Iskandar Djabir Syah selalu berdialog dengan rakyatnya. Selama dalam perjalanan itu ia selalu disertai oleh Sultan Tidore Zainal Abidin dan Sultan Bacan Muksin Usman. Tepat 15 Maret 1954 Sultan Iskandar Djabir Syah mengakhiri kunjungannya dan kembali ke Jakarta⁶¹.

Setelah pensiun dari dinas Kementerian Dalam Negeri pada 1969, sisa hidup Sultan Iskandar Djabir Syah dihabiskan di Jakarta. Pada tanggal 4 Juli 1975, Sultan Iskandar Djabir Syah meninggal dalam usia ke 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman umum Pekuburan Karet. Selama berada di Jakarta (1950-1976) atau sebelas tahun Sultan Iskandar Djabir Syah belum menyiapkan pergantian atau pelantikan sultan baru di Kesultanan Ternate. Hal ini menegaskan bahwa dalam tradisi Kesultanan Ternate tidak mengenal putra mahkota yang telah disiapkan oleh sultan sejak masih hidup. Bahkan pengangkatan seorang *kolano* (sultan) tidak semua sultan melihat putranya naik tahta dan memerintah, karena pergantian tahta dari sultan kepada anak hanya terjadi setelah yang sultan yang berkuasa meninggal.

Dalam kekosongan tersebut, bermufakatlah lembaga adat yang terdiri atas *Komisi Nga Ruru* (4 bidang eksekutif) dan lembaga legislatif *bobato nyagimo setofkange* (dewan 18) sebagai pemegang *adat se aturan di limau jore-jore*

⁶⁰ Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.

⁶¹ Irza Armita Djafar, *op.cit.*, hlm. 170-171.

kemudian melantik Mudafar Syah sebagai Sultan Ternate ke 47 pada 29 November 1976 di Kesultanan Ternate dalam upacara *kabasarang kolano* (pelantikan sultan baru).

F. Penutup

Sejarah menunjukkan partisipasi politik elite Kesultanan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946. Terbentuknya Negara Indonesia Timur kemudian menjadi inspirasi politik bagi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Sjah (Sultan Ternate ke-47), untuk melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, dengan mengikuti konferensi Malino dan Denpasar sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara sekaligus merupakan salah satu disainernya. Sebagai tokoh federalis yang memperjuangkan pembentukan Negara Indonesia Timur dari konferensi Malino hingga Denpasar, maka dalam perkembangannya pada tahun 1949, Iskandar Jabir Syah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri NIT pada kabinet J.E. Tatengkeng (27 Desember 1947-14 Maret 1950).

Realitas politik menunjukkan, tatkala rezim Soekarno berkuasa, elite Kesultanan Ternate mengalami pembatasan. Pilihan politik Sultan Ternate ke-47 Iskandar Djabir Syah (1929-1975) dalam mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook pada 1946, berimplikasi diasingkannya ke Jakarta pada 1950 karena dituduh sebagai tokoh federalis. Perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan inilah yang mendorong elite kesultanan tidak mendukung partai pemerintah Soekarno pada pemilu 1955. Pilihan politik tersebut tentu tidak menguntungkan posisi mereka karena harus menghadapi, tidak hanya rival politik lokal, namun juga kekuatan nasional.

Sikap konfrontatif elite kesultanan tersebut, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam membatasi peran politik mereka, seperti; *pertama*, pembubabaran dewan raja-raja (badan eksekutif), terdiri dari Sultan Ternate, Tidore dan Bacan dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif) yang mendukung federalisme pada tahun 1950. Konsekuesinya elite kesultanan tidak lagi mempunyai instrumen legal-formal dalam mempengaruhi

pemerintahan lokal. Kontrol mereka terhadap birokrasi kemudian digantikan oleh bupati yang dipilih oleh DPRD. *Kedua*, penghapusan Karesidenan Ternate dan pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Maluku Utara berdasarkan UU. No. 60 tahun 1958. Konsekuensinya, penguasa di Tingkat II (Bupati) tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya tetapi dipilih melalui pemilu dalam format politik modern. *Ketiga*, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tentang pembatasan dan kepemilikan tanah atau pengambilalihan oleh negara terhadap tanah-tanah swapraja.

Selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI), menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate. Apakah beberapa kebijakan tersebut diatas, berpengaruh terhadap eksistensi politik mereka di Ternate atau sebaliknya. Faktanya, walaupun eksistensi politik mereka mendapatkan pembatasan. Namun secara kultural, tidak berdampak pada merosotnya kekuasaan elite kesultanan. Salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyan *jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan disitulah kami).

Dalam budaya Ternate, sultan sangat dihormati dan dipatuhi karena diyakini mewarisi kebesaran dan kewibawaan yang membawa pada kedamaian, keadilan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah kata kunci bahwa begitu pentingnya bangsawan dimata rakyat. Hubungan sosial tersebut bukan hanya bersifat *patron-clein*, namun pada dasarnya mencerminkan ciri budaya masyarakat yang bersifat khusus dalam menjaga hubungan antara masyarakat dan pimpinan dalam tradisi sosial Ternate. Hal ini tercermin dalam semboyan hidup masyarakat Ternate "*ino foma Makati nyinga, doka gosora se bualawa, om doro ya momote, fo magogoru fo madudara*" (mari kita berkasih sayang, seperti buah pala dan fulinya, matang bersama, gugur bersama, dilandasi kasih dan sayang).

DAFTAR PUSTAKA

- Kahin, A.R. (1990). *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti.
- Amal, Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- Bousoiri, Chasan. (.....). *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*. Jakarta.
- Djoko Suryo, dkk. (2001). *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakarta: UGM LKPSM.
- Hanna, W.A dan Des Alwi. (1996). *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nachrawy, H.RD. (2003). *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate: Yayasan Kie Raha.
- Djafar, I.A. (2005). *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta: Bio Pustaka.
- Gde Agung, I.A.A. (1985). *Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: UGM Press.
- Andaya, L.Y. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Katoppo, L. (1984). *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mudaffar Syah. (2009). *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate: Goheba.
- Widjojo, M. (2009). *The Revolt of Prince Nuku: Cross Cultural Alliance Making in Maluku, c. 1780-1810*. Leiden: Boston.
- Muchtar, N, dkk. (2003). *Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemeliharaan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI.
- Nalanan, R. (1981). *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*. Jakarta: Gubung Agung.
- Radjiloen L. (1982). *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*. Ternate: Depdikbud.
- Leirissa, R.Z. (1975). *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI.
- Hasim,R. (2018). *Sultan dalam Sejarah Politik Ternate, 1945-2002*. Ternate: LepKhair.
- Hasim, R. (2016). "Sultan Iskandar Djabir Syah: from Malino Conference To The Minister Of Internal Affairs Of Negara Indonesia Timur" dalam *Jurnal Paramita, Vol.26, No.2*.
- Hasim, R dan Mustafa Mansur. (2015). "Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950" dalm *Jurnal ETNOHISTORI Vol.II. No.1. April*.
- Muhammad, S. (2006). *Kesultanan Ternate: Sejarah Sosial Ekonomi & Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Kutoyo,S. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.